

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Disaat ini perkembangan teknologi merupakan suatu kebutuhan yang tidak bisa dipisahkan dengan kehidupan setiap individu di dunia, setiap Negara di dunia berlomba-lomba untuk menciptakan suatu inovasi guna meningkatkan produktivitas manusia agar lebih efektif dan efisien tidak terkecuali di Indonesia dimana hal tersebut dinamakan dengan era globalisasi, adapun era globalisasi merupakan masa yang mengharuskan adanya suatu perubahan besar dan yang pada saat ini berkembang dengan pesat karena adanya dukungan pengembangan penelitian baik di bidang informasi dan komunikasi, yang dapat menjadi pemain kunci dalam penciptaan teknologi yang dapat membantu pengembangan informasi dan komunikasi baik satu arah ataupun dua arah yang lebih efektif dan efisien untuk prduktivitas dalam segala bidang kehidupan manusia termasuk di Indonesia.

Sebagai salah satu negara berkembang Indonesia juga berusaha untuk mengadopsi berbagai macam teknologi informasi dan komunikasi sampai pada akhirnya pada saat ini kebutuhan teknologi yang berbasis pada internet merupakan suatu kebutuhan sehari-hari untuk masyarakat Indonesia. Sehubungan dengan tuntutan global dan indonesia akan meningkatkan teknologi informasi dan komunikasi, hal tersebut juga yang dicoba oleh Pemerintah Indonesia dalam upaya peningkatan pelayanan publik sebagai tupoksi pemerintah dalam

menyediakan pelayanan yang prima untuk membantu kebutuhan masyarakat Indonesia yang mana dalam pelayanan publik mencerminkan hubungan antara sebuah Negara dengan warga masyarakatnya. Sebagai upaya peningkatan pelayanan publik di Indonesia perlu adanya suatu usaha dalam pengembangan adanya internet yang luas dan terintegrasi oleh aspek pemerintah dapat disebut dengan istilah *electronic government* atau *E-Government* yang merupakan reformasi dari pelayanan publik.

Dalam pengertiannya, *E-government* adalah metode atau teknik interaksi baru yang ada dalam hubungan pemerintah dengan masyarakat dan pihak lain yang memiliki kepentingan yang sama, itu melibatkan penggunaan teknologi informasi, khususnya internet, dan harapan bahwa kualitas layanan dapat ditingkatkan (Indrajit dalam Pranalina, 2015). Dengan adanya uraian tersebut menjelaskan bahwa implementasi *E-government* merupakan salah satu upaya dalam mendukung kinerja pemerintah yang berbasis teknologi informasi dan komunikasi. Berkaitan dengan *E-government*, tujuan diterapkannya konsep tersebut adalah untuk mempermudah pihak masyarakat ketika melakukan pelayanan publik untuk mempermudah pihak pemerintah untuk mengerjakan pelayanan kepada masyarakat yang menurut Rinto dan Lestari (2010) yang mengarah dan bertujuan sesuatu yang ingin dicapai dengan E-governmet adalah: 1) Adanya sistem jaringan berbasis teknologi internet yang dapat menghubungkan instansi pemerintah, pemerintah dengan dunia usaha, dan masyarakat luas, serta memungkinkan terjadinya komunikasi dua arah untuk meningkatkan terjadinya komunikasi dua arah untuk meningkatkan koordinasi

penyelenggaraan pemerintahan; 2) Adanya aplikasi informasi atau sistem pengolahan data yang terintegrasi untuk mendukung penyebaran informasi yang memenuhi standar transparansi dan akuntabilitas; 3) Aplikasi otomatisasi kerja dan pelayanan publik dapat ditingkatkan untuk memudahkan individu yang membutuhkan untuk mendapatkan bantuan (Pranalia, 2015).

Berkaitan dengan implementasi *E-government* yang menjadi salah satu perwujudan dari penerapan konsep pemerintahan berbasis teknologi informasi dan komunikasi tersebut adalah terselenggaranya daerah Kota dan/atau Kabupaten yang cerdas, hal tersebut juga dapat disebut dengan *Smart Regency* atau *smart regency*. Terdapat banyak definisi dari *Smart Regency /regency*, salah satunya adalah dikatakan bahwa *Smart Regency* merupakan sebuah kota yang mampu untuk mengidentifikasi beragam masalah yang ada di kota tersebut mulai dari hal yang menyangkut permasalahan infrastruktur sampai dengan hal yang menyangkut tentang bencana (Nam T dan Pardo, 2011). Adanya konsep *Smart Regency* ini bertujuan untuk pembentukan dan penerapan suatu kota yang aman, nyaman, dan terkendali dan menyediakan kemudahan akses bagi warganya serta memperkuat daya saing dalam hal perekonomian, sosial, sampai dengan budaya pada suatu Kota atau Kabupaten tersebut. Adapun dalam implementasi konsep *Smart Regency* perlu adanya perencanaan dan komitmen yang sungguh-sungguh dan juga keterlibatan seluruh aktor yang menjadi pemangku kepentingan yang ada di wilayah kota dan/atau kabupaten yang dimaksud, hal tersebut sesuai dengan apa yang dikemukakan oleh Nam dan Pardo bahwa dalam pembangunan *Smart Regency* terdapat tiga dimensi yang menjadi pendorong dan perlu terintegrasi

oleh kota atau wilayah kabupaten diantaranya teknologi, manusia, dan institusi (Rahmadanita et al., 2019).

Terdapat salah satu wilayah di Indonesia yang juga mengembangkan sistem *E-government* dan menerapkan konsep yang serupa dengan *Smart Regency*. Kabupaten Sleman, salah satu Kabupaten di Daerah Istimewa Yogyakarta, adalah lokasinya. wilayah tersebut menjalankan mengadopsi sistem atau konsep *smart regency* yang disesuaikan dengan kewilayahan dari Kabupaten Sleman. Pemerintah Kabupaten Sleman telah mengadopsi konsep *smart regency* dimana hal tersebut bertujuan untuk upaya implementasi misi dari Pemerintah Kabupaten Sleman yaitu meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik melalui peningkatan kualitas birokrasi yang responsif, hal ini dapat diartikan bahwa birokrasi publik pada saat memberikan respon, dan menjalankan tugas serta wewenang dapat di pertanggung jawabkan sehingga dapat memberikan pelayanan publik yang baik.

Adanya proses peningkatan pelayanan publik dan implementasi dari *smart regency* juga merupakan perwujudan yang sejalan dengan visi Kabupaten Sleman pada periode 2016-2021, adapun visi dari Kabupaten Sleman adalah "Terwujudnya masyarakat Sleman yang lebih Sejahtera, Mandiri, dan Berbudaya dan Terintegrasikannya sistem *E-government* menuju *smart regency* pada tahun 2021". Selain tertera pada visi, konsep *smart regency* juga tertera dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sleman 2016-2021 yang mana hal tersebut menjadi salah satu batu pijakan dan arah pembangunan Kabupaten Sleman dalam mengimplementasikan *smart regency*. Apa yang disebut

dengan *smart regency* tersebut dapat diartikan bahwa Kabupaten Sleman tergolong cerdas suatu upaya untuk secara efektif dan efisien mengembangkan dan mengelola barang sumber daya yang dimiliki melalui penggunaan teknologi informasi dan komunikasi sebagai basis dari pelayanan publik di bidang pemerintahan.

Berangkat dari visi dan rancangan pembangunan tersebut, telah diundangkannya Peraturan Bupati (Perbup) 1.1 tahun 2018 tentang masterplan *Smart Regency* dimana pada master plan tersebut dijelaskan bahwa terdapat beberapa hubungan elemen Sleman *smart regency* dengan misi pembangunan yang ada di Kabupaten Sleman, hubungan tersebut antara lain : 1) *Smart Governance*, terkait dengan upaya untuk menawarkan layanan masyarakat, mengembangkan tata kelola pemerintah yang baik dengan meningkatkan kualitas birokrasi yang responsif dan menerapkan e-governmnet yang terintegrasi; 2) *Smart Living*, berkaitan dengan upaya mengembangkan layanan pendidikan dan kesehatan berkualitas tinggi yang dapat diakses oleh semua lapisan Kabupaten Sleman; 3) *Smart Economy* berkaitan dengan upaya penguatan sistem ekonomi kerakyatan, aksesibilitas, dan kemampuan ekonomi rakyat serta penanggulangan kemiskinan; 4) *Smart Environment* berkaitan dengan pemantapan dan peningkatan kualitas pengelolaan sumber daya alam, penataan ruang, lingkungan hidup dan kenyamanan; 5) *Smart Society* dan *Smart Branding* yang berkaitan dengan kesetaraan gender dan budaya masyarakat berkualitas (Diskominfo Sleman, 2021).

Seperti yang telah dikemukakan oleh Nam dan Pardo bahwa implementasi *Smart Regency* atau yang pada penelitian ini dibahas adalah *Sleman Smart Regency* memerlukan pendorong yang saling terintegrasi yaitu teknologi, manusia, dan institusi. Dalam penelitian ini yang dibahas adalah aspek institusi dimana pada implementasi model pemerintahan digital atau *E-government* dan penerapan konsep *Sleman Smart Regency* terdapat salah satu institusi pemerintahan yang dapat menjadi pendorong utama dalam implementasi konsep tersebut, institusi tersebut adalah Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sleman yang merupakan unsur dari pelaksanaan urusan pemerintahan dalam bidang komunikasi dan informatika yang mana instansi tersebut mempunyai tupoksi salah satunya adalah pelaksanaan, pelayanan, pembinaan, dan pengendalian urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika, persandian, dan bidang statistik (Diskominfo Sleman, 2021). Dalam implementasi *smart regency* di Kabupaten Sleman tentunya Diskominfo memiliki kapabilitas yang sangat penting, dimana instansi tersebut mempunyai Sumber Daya yang sangat mumpuni dalam upaya pelaksanaan sampai dengan pengembangan faktor-faktor yang dapat menyukseskan master plan Kabupaten Sleman untuk menuju *Sleman smart regency* pada tahun 2021.

Alasan peneliti untuk menentukan Kabupaten Sleman dalam pemilihan topik dan juga tujuan dari penelitian karena berdasarkan informasi yang dikumpulkan berdasarkan data yang diteliti tentang program kementerian komunikasi dan informatika yaitu Gerakan Menuju 100 Smart Regency, Kabupaten Sleman merupakan salah satu wilayah di DIY yang pertama kali

menjadi salah satu dari beberapa Kabupaten dan Kota mendapat bimbingan teknis untuk implementasi *Smart Regency* atau *smart regency* pada tahun 2017 (Kementerian Komunikasi dan Informatika RI, 2018). Selain itu pada tahun 2018 Dalam ajang Inonesia Smart Nation Award (ISNA) 2018, Kabupaten Sleman menduduki peringkat kedua Best Smart Governance yang mana dalam penerimaan penghargaan tersebut diwakilkan oleh Diskominfo Kabupaten Sleman. Berdasarkan teori kapabilitas instansi pembangunan nasional dimana dijelaskan bahwa pemerintah memiliki peranan yang besar dalam proses pembangunan, peran yang dapat digarisbawahi adalah sebagai stabilisator, inovator, modernisator, pelopor dan pelaksana kegiatan pembangunan tertentu (Siagian, 2000), berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan menarik untuk dapat mengetahui bagaimana kapabilitas Diskominfo Sleman untuk membantu mewujudkan visi dan master plan Kabupaten Sleman dalam mengimplementasikan E-government menuju Sleman Smart Regency pada tahun 2021 dengan keadaan Negara Indonesia yang semenjak tahun 2019 telah tertimpa pandemic covid 19 yang memaksa seluruh pihak baik pemerintah dan masyarakat Indonesia sendiri untuk menghadapi keadaan yang cenderung baru. Dengan latar belakang tersebut di atas, penulis meningkatkan fenomena ini menjadi judul skripsi, yaitu : "Kapabilitas Diskominfo Dalam Implementasi E-Government di Kabupaten Sleman Menuju Smart Regency Tahun 2021". Dimana dalam penelitian ini mencoba untuk mengetahui bagaimana kapabilitas dari salah satu pendorong dalam implementasi *Smart Regency* atau *Sleman smart regency*.

1.2 Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan Penjelasan latar belakang dijelaskan terdapat pertanyaan penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana Kapabilitas Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sleman dalam pengembangan *E-government* untuk mendukung implementasi *smart regency* di Kabupaten Sleman tahun 2021?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan tujuan dari penelitian yang dilakukan berdasarkan topik penelitian saat ini, yaitu:

1. Untuk mengetahui Kapabilitas Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sleman dalam pengembangan *E-government* pada proses implementasi *smart regency* di Kabupaten Sleman tahun 2021.
2. Untuk mengetahui faktor-faktor yang mendukung Implementasi Smart Regency di Kabupaten Sleman.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan akan memberikan beberapa manfaat diantaranya sebagai berikut :

1. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan juga kontribusi yang dapat menjadi pendukung serta pengembangan ilmu pengetahuan secara umum dan juga program studi ilmu pemerintahan khususnya

yang berkaitan dengan pengembangan *E-government* dan implementasi konsep *Smart Regency*.

2. Menjadi bahan referensi atau sumber tambahan bagi mahasiswa khususnya mahasiswa Ilmu Pemerintahan baik secara umum atau khusus mahasiswa Universitas AMIKOM Yogyakarta dan juga dapat menjadi bahan pengembangan penelitian yang sejenis.
3. Dapat menjadi sumber informasi dan bahan evaluasi untuk instansi atau pihak terkait khususnya yang menjadi objek dari penelitian ini yaitu Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sleman.

1.5 Sistematika Bab

Ada sistemik proses penulisan yang digunakan dalam pembuatan skripsi ini, yaitu sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini memberikan informasi latar belakang tentang kesulitan topik skripsi, Pertanyaan Penelitian, tujuan penelitian, manfaat penulisan, dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini menjelaskan dari konsep teori yang digunakan dan berkaitan dengan tema dalam penelitian ini yaitu implementasi kebijakan publik, bersama dengan penjelasan penelitian sebelumnya, kerangka berpikir, dan ide penelitian (jika ada)

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini membahas berbagai bentuk penelitian, serta metode yang digunakan untuk mengumpulkan data, metodologi pengolahan data, variabel penelitian, dan kebutuhan penelitian.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisi temuan analisis, serta bukti-bukti yang dikumpulkan dari masalah penelitian yang relevan dengan teori, konsep, dan hipotesis, serta metode yang digunakan untuk membahas kapabilitas Diskominfo dalam implementasi E-governmnet di Kabupaten Sleman menuju Smart Regency tahun 2021.

BAB V PENUTUP

Bab ini memuat berbagai kesimpulan, argumen, dan proposal, serta agenda penelitian yang harus diselesaikan atau dikembangkan.